

Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah>  
Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 26 (1), 2022, 97-119

## **Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Palmerah Jakarta Barat pada Masa Pandemi Covid-19**

Yogi Sasongko & Suhendra

### *Abstrak*

*Pandemi Covid-19 telah memunculkan krisis multidimensi yang menyebabkan kerapuhan dalam berbagai aspek khususnya aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dampak tersebut sangat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi pelaku usaha mikro di wilayah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian ini berusaha menganalisa dan mendeskripsikan kesejahteraan sosial ekonomi PKL di Kecamatan Palmerah selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penggalian informasi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 para PKL di Kecamatan Palmerah mendapatkan tantangan dan masalah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek, yaitu; perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasional dan waktu luang, serta bantuan dan jaminan sosial. Sedangkan kesejahteraan ekonomi PKL pada masa pandemi Covid-19 telah mengalami goncangan dan keterpurukan usaha perdagangan, yang dapat diketahui melalui beberapa aspek seperti: kondisi usaha PKL, produksi dan penjualan, serta bantuan dan pelatihan usaha bagi PKL selama pandemi Covid-19.*

*Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Ekonomi, PKL, Pandemi Covid-19*

### Abstract

The Covid-19 pandemic has created a multidimensional crisis that causes fragility in various aspects, especially the health, economic and social aspects of society. This impact is felt by various levels of society, especially Street Vendors (PKL) who are micro business actors in the Palmerah sub-district, West Jakarta. This study attempts to analyze and describe the socio-economic,

welfare of street vendors especially those in the Palmerah district during the Covid-19 pandemic. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observations, and other information mining. The results showed that during the Covid-19 pandemic street vendors in the Palmerah District faced challenges and problems in realizing socio-economic welfare. Social welfare covers several aspects, namely; housing, education, health, recreation and leisure, and social assistance and security. While the economic welfare of street vendors during the Covid-19 pandemic has experienced a shock and slump in the trading business, which can be identified through several aspects such as: business conditions of street vendors, production and sales, as well as assistance and business training for street vendors during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Social Welfare, Economic Welfare, Street Vendors, Covid-19 Pandemic

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwah.v26i1.28839>

## Pendahuluan

Fenomena wabah virus yang terjadi di dunia muncul pertama kali di Wuhan Provinsi Hubei China pada Desember 2019. Sesuai dengan *timeline* yang dirilis kantor berita Xinhua, Wuhan mengumumkan wabah pneumonia di kota pada 31 Desember 2019, dan pada 9 Januari 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa virus Corona misterius penyebab kluster pneumonia di Wuhan ([cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), 2021). Sementara pada awalnya virus ini dinamakan *2019 novel coronavirus (2019-nCoV)*, kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Berdasarkan

Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee* mengeluarkan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*". Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Persebaran Covid-19 yang pesat telah memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan Negara, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, hingga kebiasaan kehidupan manusia. Kemunculan Covid-19 di Indonesia telah mendapatkan respon dari pemerintah sejak Maret 2020 dengan dikeluarkan berbagai peraturan dan instrument telah disiapkan serta dilaksanakan dalam penanganan Covid-19, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga kondisi *new normal* yang diterapkan pemerintah Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut,

Pemerintah Indonesia juga mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan *social distancing*, himbauan *Work From Home* bagi pegawai, memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, membagikan vaksin gratis, menyediakan rumah sakit dan tempat lainnya khusus untuk penanganan Covid-19. Namun begitu, dampak Covid-19 senantiasa terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Dampak dari sebaran Covid-19 telah memunculkan krisis multidimensi yang menjadikan negara-negara di dunia mengalami kerapuhan dalam berbagai bidang khususnya kesehatan dan ekonomi masyarakat. Dampak kesehatan dari adanya Covid-19 terlihat dari banyaknya jumlah kasus hingga kematian akibat Covid-19. Kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia menurut laporan Maharani (kompas.com, 2021) sesuai dengan data perkembangan dari WHO menunjukkan bahwa kematian akibat Covid-19 di Indonesia pada 13 Agustus 2021 merupakan tertinggi di dunia, dimana kasus kematian yang dilaporkan pemerintah sejak 16 Juli hingga 14 Agustus 2021 yaitu sebesar 46.174 jiwa. Kasus kematian akibat Covid-19 tersebut menjadi cerminan persoalan kesehatan dari hulu ke hilir, atau sejak kegagalan lacak dan tes serta keterlambatan isolasi atau perawatan hingga masalah dalam perawatan kesehatan seperti keterbatasan obat-obatan, oksigen, dan juga tenaga kesehatan.

Selain bidang kesehatan, dampak pandemi Covid-19 juga telah merapuhkan bidang ekonomi masyarakat khususnya usaha perdagangan yang terdampak.

Guncangan perekonomian akibat Covid-19 telah membuat perekonomian dunia turun, menurut laporan Putra (cnbcindonesia.go.id, 2020) bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) telah memperkirakan ekonomi dunia akan mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) 4,9% lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Krisis pada bidang ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19 menurut Modjo (2020;104) telah menyebabkan kontradiksi ekonomi global sebesar -0,2% hingga 2,5% pada tahun 2020, kontradiksi tersebut telah memukul sisi permintaan dan juga penawaran yang menjadikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, guncangan dan krisis pada bidang ekonomi yang timbul pada masa pandemi Covid-19 menurut laporan pers Humas Kemenkop dan UKM telah memberikan dampak besar terhadap para pelaku usaha, dan 99% pelaku usaha tersebut adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (depkop.go.id, 2020). Perjalanan sejarah UMKM telah menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat bahwa UMKM merupakan bentuk perekonomian kerakyatan yang dianggap mampu bertahan dan sebagai penyelamat perekonomian Indonesia pada masa-masa krisis periode 1998-2000 serta krisis 2008. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap UMKM telah ditunjukkan dengan dibentuknya sebuah Kementerian yang digabung dengan Koperasi yang selama ini telah diperjuangkan (Putriana, 2012), selanjutnya Kementerian tersebut Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, muncul harapan bahwa UMKM mampu bertahan dan juga

menjadi penyelamat dari goncangan dan krisis ekonomi yang terjadi dalam masa pandemi Covid-19 saat ini.

Namun begitu, menurut Fathoni (2020; 38-39) dampak besar dalam masa pandemi Covid-19 juga telah menyentuh sektor UMKM, dampak ekonomi pada UMKM tersebut meliputi; tidak sedikit PHK, banyak karyawan dirumahkan, menurunnya volume dan omset penjualan, menurunnya jumlah pembeli UMKM, Harga APD melangit, vitamin C naik harga, bahan pokok naik, beberapa pasar ditutup, dan UMKM terancam bangkut atau gulung tikar. Kondisi tersebut menunjukkan keterpurukan para pelaku usaha dan juga UMKM yang telah terlihat sejak awal sebaran Covid-19, selain itu kondisi tersebut juga diperkuat dengan munculnya pemberlakuan berbagai kebijakan dan ketetapan dari pemerintah yang diberlakukan dalam masa pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

Dampak multidimensi pandemi Covid-19 terhadap kondisi masyarakat tersebut juga diikuti kebijakan dan ketetapan pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19 telah memunculkan masalah sosial ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial (Soekanto, 2013). Sehingga pandemi Covid-19 beserta berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 tersebut tentu memberikan dampak sosial

ekonomi masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial serta menghambat terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan kelompok sosial dalam masyarakat.

Menurut Alifa (2020), beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 diantaranya yaitu; Kelangkaan barang, Disorganisasi dan Disfungsi sosial, Tindakan kriminal, Melemahnya sektor pariwisata, Angka Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Masalah sosial ekonomi tersebut khususnya sangat dirasakan oleh pekerja sektor informal yang mendapatkan pendapatan harian telah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, sektor informal tersebut seperti pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja harian yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan harian (Puspensos. kemsos.go.id, 2020). Kondisi tersebut juga telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Selain UMKM, sektor lainnya yang juga menghadapi masalah dan tantangan selama masa pandemi Covid-19 adalah kelompok sektor usaha informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat 17 dan 18 menjelaskan Usaha Jasa PKL dan penjelasan PKL sebagai berikut; pasal 17, Usaha Jasa Pedagang Kaki Lima adalah Kegiatan usaha jasa perdagangan yang termasuk pada kegiatan usaha mikro menempati prasarana, sarana, dan utilitas umum milik Pemerintah Daerah,

tahan/lahan milik perorangan/badan yang telah mendapatkan izin dari Gubernur sebagai tempat usaha. Pasal 18, PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat

PKL yang merupakan sektor usaha informal ataupun usaha mikro yang telah berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran hingga mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Kegiatan usaha PKL tampak pada para pedagang pinggir jalan dan pedagang-pedagang di pasar tradisional menunjukkan betuk perekonomian kerakyatan yang menjadi identitas PKL, pendapatan usaha PKL merupakan pendapatan harian. Kondisi tersebut menjadikan PKL sesuai dengan dinamika ekonomi masyarakat, selain itu PKL juga rentan terhadap konflik dan masalah yang muncul dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pemberlakuan ketetapan dan juga kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui PSBB ataupun PPKM telah memunculkan berbagai masalah sosial ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Contoh kasus yang terjadi di wilayah Jakarta Barat, sejak tingginya kasus Covid-19 dan pemerintah membuat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beberapa pedagang mengeluhkan keadaan ini.

Berbagai permasalahan yang sering dihadapi para pelaku usaha informal dan PKL di Palmerah adalah penertiban dan pengurusan hingga

relokasi tempat usaha, sekarang, sektor informal dan PKL di Palmerah juga menghadapi tantangan masa pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan pemerintah dalam menekan sebaran Covid-19. Pemberlakuan PSBB dan PPKM berbagai Level merupakan ketetapan pemerintah dalam menekan sebaran Covid-19 telah membuat masyarakat menderita, khususnya pedagang kaki lima yang juga turut merasakan dampak dari pemberlakuan kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut disampaikan oleh Shemi (2020) terkait penderitaan PKL di Palmerah saat pandemi Covid-19 diantaranya yaitu; Tidak bisa berjualan penuh dalam waktu satu minggu; Penurunan pendapatan hingga sepertiga dari biasanya; Tidak bisa pulang kampung dan memilih tetap berusaha untuk berjualan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap kesejahteraan sosial ekonomi PKL di wilayah Palmerah yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Palmerah Jakarta Barat di Masa Pandemi Covid-19”. Berdasarkan pembatasan masalah penelitian diatas, maka dapat diperlukan perumusan masalah penelitian yakni Bagaimana kesejahteraan sosial ekonomi pedagang kaki lima di Palmerah Jakarta Barat di masa pandemi Covid-19?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penelitiannya sebagian besar dilakukan terjun langsung ke lapangan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, dengan waktu penelitian dari bulan September 2021 hingga Maret 2022. Teknik pemilihan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya orang tersebut dianggap mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi yang diteliti (Sugiono 2009, 54). Informan yang peneliti pilih sesuai dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan memilih narasumber yang kompeten dalam bidangnya serta memahami detail informasi yang peneliti kaji. Beberapa informan yang peneliti pilih meliputi; pihak pemerintahan Palmerah, pedagang kaki lima, dan tokoh masyarakat di Palmerah Jakarta Barat.

### **Pengertian Kesejahteraan Sosial-ekonomi**

Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2009: 3) adalah sebagai berikut :Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu. Definisi tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga sosial yang beraktifitas atau yang berperan penting dalam mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusinya dalam

pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakat.

Definisi kesejahteraan sosial tentunya sangatlah beragam, namun pada intinya seluruh definisi kesejahteraan sosial tersebut merujuk pada keberfungsian sosial yang terjadi dalam upaya untuk dapat meningkatkan kebutuhan dalam masyarakat. Salah satu definisi yang juga tidaklah jauh berbeda dengan definisi kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan diatas adalah definisi kesejahteraan sosial menurut UU No.6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang diperbaharui dalam UU No.11 Tahun 2009 yang dikutip oleh Fahrudin (2012: 10) adalah sebagai berikut: Menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Definisi di atas menjelaskan kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan yang bertujuan dengan pelayanan untuk individu, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Ekonomi menurut Anshori (1983; 67) merupakan kegiatan manusia dengan masyarakat untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi berbagai rupa kebutuhan. Menurut Qordhawi (2001; 33) ekonomi juga merupakan bagian dari tatanan Islam yang prospektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi, keseimbangan diterapkan dalam segala segi yang meliputi;

perimbangan antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antar golongan dan masyarakat. Selain pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi juga seharusnya mengikuti asas keseimbangan ekonomi yang adil dan dapat menghindarkan ketimpangan unsur-unsur ekonomi dan produksi dalam mewujudkan tujuan ekonomi.

Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi juga mengarah pada upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang menurut Sumodiningrat (1998; 6-7) perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural. *Structure adjustment* atau *structure transformation* dapat dilakukan dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ekonomi tersebut meliputi; proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Oleh karena itu, perubahan struktural ekonomi tersebut mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi, pemberdayaan manusia sebagai sumber daya.

### **Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pedagang Kaki Lima atau biasa selanjutnya disebut PKL berasal dari kata *five feet* yang merupakan istilah yang digunakan ketika zaman Belanda, dimana semua gedung di jalan utama Batavia diwajibkan membangun fasilitas untuk pejalan kaki atau sekarang dikenal trotoar dengan ketinggian 31 cm dari permukaan

jalan raya dan lebarnya *five feet* atau sekitar 152 cm (Pratama, 2021). Menurut Hanggoro (2015), kehadiran Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut PKL bisa dirunut hingga ke zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Saat itu, Raffles memerintahkan beberapa pemilik gedung di jalanan utama Batavia untuk menyediakan trotoar selebar lima kaki (*five foot way*) untuk pejalan kaki.

Selanjutnya, fasilitas pejalan kaki atau trotoar bagi pejalan kaki tersebut dimanfaatkan oleh pedagang keliling untuk menjual dagangannya dengan mangkal di trotoar, oleh karena itu dari istilah trotoar *five feet* atau lima kaki, maka para pedagang tersebut disebut sebagai pedagang kaki lima (Pratama, 2021). Berdasarkan tulisan *Mayapada* (15 Desember 1967) istilah *five foot* disalahmakhakan sebagai kata majemuk kedalam bahasa melayu, sehingga terjemahannya bukan lima kaki melainkan kaki lima. Istilah tersebut menjalar ke Medan sampai di Jakarta dan menyebar ke kota-kota di Indonesia (Hanggoro, 2015).

Dalam perkembangan PKL mengalami peningkatan jumlah pada tahun 1934 sebagai buntut dari masa depresi yang melanda dunia pada tahun 1930-an, dan terus mengalami peningkatan setelah kemerdekaan, bahkan Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyebut mereka sebagai salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta pada dekade 1950-an (Hanggoro, komunitashistoria.com, 2015). Menurut *Mayapada* (15 Januari 1968) dalam Hanggoro (2015) menyebutkan bahwa memasuki tahun 1960-an PKL dipandang merusak keindahan kota, cara dagangnya primitif,

dan membuat malu negara negara jika tamu asing datang. Gubernur Ali Sadikin berusaha bersikap tegas dalam menindak PKL yang membandel, selain itu juga disediakan lahan baru untuk PKL yang tertuang dalam Pengumuman Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 Juli 1971 No Ib.1/1/11/1970.

Secara geografis, Kecamatan Palmerah berbatasan dengan wilayah Grogol Petamburan sebelah utara; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gambir-Jakarta Pusat; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanah Abang-Jakarta Pusat dan Kecamatan Kebayoran Lama-Jakarta Selatan; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kebayoran Lama-Jakarta Selatan. Wilayah Kecamatan Palmerah terdiri dari Enam (6) Kelurahan, 61 RW (Rukun Warga), dan 712 RT (Rukun Tetangga), diantaranya yaitu; 1) Kelurahan Palmerah, terdiri dari 176 RT dan 17 RW. 2) Kelurahan Slipi, terdiri dari 79 RT dan 7 RW. 3) Kelurahan Kemanggisan, terdiri dari 114 RT dan 9 RW. 4) Kelurahan Kota Bambu Utara, terdiri dari 108 RT dan 9 RW. 5) Kelurahan Kota Bambu Selatan, terdiri dari 83 RT dan 9 RW. dan 6) Kelurahan Jati Pulo, terdiri dari 150 RT dan 10 RW (BPS, 2021).

Jumlah penduduk di Kecamatan Palmerah sesuai dengan pelaporan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat (BPS, 2021) terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) berjumlah total 232.874 Jiwa dan Warga Negara Asing (WNA) berjumlah total 86 Jiwa. Kondisi sosial dan ekonomi dalam pembahasan ini secara umum membahas kondisi sosial ekonomi yang menjadi gambaran indikator kesejahteraan sosial di Kecamatan

Palmerah-Jakarta Barat. Pembahasan terkait dengan kondisi kesejahteraan sosia ekonomi di Kecamatan Palmerah meliputi beberapa aspek diantaranya; Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Industri yang terdapat di Kecamatan Palmerah-Jakarta Barat.

Aspek ekonomi pada pembahasan ini mengacu pada beberapa sarana dan fasilitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Palmerah, meliputi; Kelompok Pertokoan, Pasar, Minimarket atau Swalayan, Toko atau Warung Kelontong, dan Bank Umum. Kelompok Pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa.

#### **A. Kesejahteraan Sosial PKL di Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 telah memunculkan masalah dan tantangan baru bagi para PKL. Selain itu, berbagai kebijakan dan ketetapan pemerintah yang mengatur kegiatan berdagang para PKL juga memberikan dampak tersendiri terhadap kesejahteraan sosial para PKL. Kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Oleh karena itu kesejahteraan sosial PKL dapat digambarkan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Namun begitu, kesejahteraan sosial PKL selama masa pandemi Covid-19 telah mendapatkan tantangan baru untuk dapat mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya. Sebagai upaya melihat kesejahteraan sosial PKL, maka perlu mengetahui tujuan dan ruang lingkup kesejahteraan sosial itu sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Zastrow (2010) bahwa kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan dan rekreasional pada setiap individu di masyarakat. Sehingga kesejahteraan sosial PKL dapat dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan dan rekreasional.

Lebih lanjut, menurut Schneiderman yang juga dikutip oleh Fahrudin (2012) menyebutkan bahwa tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Selain itu juga bertujuan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Mengacu pada penjelasan di atas, dapat digambarkan tujuan kesejahteraan sosial yang juga menjadi ruang lingkup kesejahteraan sosial PKL yaitu meliputi berbagai aspek, diantaranya yaitu; sosial, ekonomi, kesehatan, rekreasional, serta tercapainya standar kehidupan pokok. Lebih lanjut, Zastrow (1996) dan Adi (2013) menyebutkan Sembilan aspek utama dalam kesejahteraan sosial, yaitu; aspek fisik, aspek perumahan, aspek

pendidikan, aspek kesehatan, aspek ketenagakerjaan, aspek ekonomi masyarakat, aspek jaminan sosial, aspek rekreasional dan aspek pekerjaan sosial. Sehingga dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial PKL dapat diartikan dengan peningkatan kualitas kehidupan PKL, yang meliputi berbagai aspek tersebut di atas.

Berdasarkan data temuan lapangan, kesejahteraan sosial PKL di masa pandemi Covid-19 diketahui melalui beberapa aspek, yaitu; perumahan atau tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasional dan waktu luang, serta bantuan dan jaminan sosial bagi para PKL selama masa pandemi Covid-19. Masing-masing dari aspek tersebut dapat dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

### **Perumahan atau Tempat Tinggal**

Kesejahteraan sosial para PKL juga dapat diketahui dari kondisi tempat tinggal atau rumah para PKL. Daerah perkotaan yang menjadi pusat perekonomian telah menjadi suatu wilayah yang banyak tersebar para PKL, mengingat bahwa PKL yang merupakan salah satu usaha mikro dan kecil menunjukkan kondisi kehidupan ekonomi menengah ke bawah. Tempat tinggal PKL khususnya di wilayah Kecamatan Palmerah kebanyakan berada di lingkungan padat penduduk, karena memang berada di wilayah DKI Jakarta sebagai pusat daerah. Selain di wilayah yang padat penduduk, tempat tinggal PKL juga biasanya berada di pinggiran bangunan-bangunan besar perkotaan ataupun fasilitas umum yang menjadi pusat perkantoran, jalan raya, ataupun bangunan besar lainnya.

Kondisi tempat tinggal para PKL di perkotaan, khususnya di wilayah Palmerah menjadi gambaran akan kondisi kehidupannya. Secara umum, tempat tinggal PKL merupakan rumah yang layak huni, walaupun mereka tinggal di lingkungan padat penduduk, daerah pinggiran, ataupun di sekitaran fasilitas umum. Ukuran rumah yang menjadi tempat tinggal PKL pun tidak besar, namun begitu tepat menjadi tempat yang layak huni bagi keluarga PKL.

Kondisi tempat tinggal atau rumah PKL seperti yang disebutkan oleh salah satu informan A sebagai berikut; *“kondisi tempat tinggal di lingkungan yang padat penduduk tapi layak gitu, emang lingkungannya agak padet, karena memang di Jakarta ini kan di daerah pusat, jadi layak memang untuk tempat tinggal, tapi memang lingkungannya agak padet”* (Wawancara A, pedagang sate ayam dan kambing khas Madura).

Pandemi Covid-19 juga telah memberikan dampak terhadap kondisi para PKL, selain dari usaha dagangnya, dampak lainnya juga terkait dengan tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan rumah. Berdasarkan data temuan lapangan, terdapat beberapa PKL yang mempertahankan usaha dagangnya dengan perpindahan tempat tinggal. Kondisi keuangan yang pas-pasan selama pandemi Covid-19 telah menjadikan PKL kembali dalam lingkungan keluarganya, mengingat ketidakmampuan biaya untuk menyewa tempat tinggal selama menjadi PKL. Demi menjaga keberlangsungan usaha, maka mereka kembali ke rumah keluarga, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usahanya.

Pemenuhan kebutuhan rumah tangga para PKL bersumber dari hasil

usaha dagangnya dalam memenuhi keperluan rumah tangga. Namun begitu, usaha berdagang yang dijalani para PKL mendapatkan tantangan dan masalah selama masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu para PKL harus berbenah diri dalam menjalankan perdagangannya yang merupakan sumber utama penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengurangan biaya hidup menjadi pilihan yang harus dilakukan para PKL untuk mampu bertahan menjalankan perdagangannya selama masa pandemi Covid-19.

### **Pendidikan**

Berbagai usaha dalam meningkatkan kualitas hidup melalui penyelenggaraan pelayanan sosial juga menyasar dalam usaha meningkatkan kualitas tingkat pendidikan, sehingga usaha meningkatkan pendidikan dapat menjadi usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi aspek penting dalam melihat kesejahteraan sosial. Tidak terkecuali para PKL yang juga memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dalam keluarga, khususnya bagi anak-anaknya. Adanya pendidikan gratis pada beberapa tingkatan pendidikan bagi anak telah membantu keluarga PKL dalam memenuhi pendidikan bagi anaknya, bahkan saat masa pandemi Covid-19. Pengeluaran biaya pendidikan bagi anak senantiasa menjadi perhatian para PKL untuk dapat memenuhi.

Masa pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada perubahan sistem dan bentuk pembelajaran. Proses belajar mengajar yang dilakukan secara online dan bisa dilakukan di rumah merupakan

suatu bentuk perubahan proses belajar mengajar. Kebutuhan yang muncul dalam bidang pendidikan selama masa pandemi Covid-19 yaitu terkait dengan penggunaan teknologi sebagai media belajar mengajar. *Handphone* atau *smartphone* telah menjadi kebutuhan utama dalam proses pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, laptop juga menjadi kebutuhan lainnya dalam pendidikan saat ini.

Kondisi pendidikan pada masa pandemi Covid-19 dalam keluarga PKL tersebut seperti yang disebutkan oleh informan A berikut ini; *“kalau untuk pendidikan itu, anak yang paling besar pertama itu di SD memang masih gratis untuk SD Negeri. Jadi untuk yang pertama kebutuhan pendidikan itu masih bisa tercover lah gitu. Tapi untuk yang kedua ini kan masih TK dan itu dibiayai bukan dari pemerintah, jadi memang itu biaya sendiri, tapi memang kita masih bisa memenuhi lah kebutuhan pendidikan yang terakhir ini anak yang kedua masih TK”* (Wawancara A, pedagang sate ayam dan kambing khas Madura).”

Pemenuhan kebutuhan akan pendidikan bagi para PKL selama masa pandemi Covid-19 juga harus mengikuti berbagai perubahan sistem dan proses belajar. Sehingga terdapat beberapa kebutuhan tambahan dalam mencukupi kebutuhan tambahan untuk pendidikan. Berbagai upaya dilakukan oleh PKL dalam memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga, mulai dari pembelian *Handphone* atau *smartphone*, paket wifi, dan juga cicilan laptop yang mendukung proses pendidikan anak selama pandemi Covid-19. Walaupun pendapatan dari hasil berdagang menurun, namun

pemenuhan kebutuhan pendidikan tetap harus diutamakan.

*Handphone* atau *smartphone* telah menjadi kebutuhan utama dalam proses pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, laptop juga menjadi kebutuhan lainnya dalam pendidikan, seperti yang disebutkan informan W berikut ini; *“pemenuhannya yaitu tadi pas anak butuh laptop ya saya usahakan walaupun kredit-kredit, saya kredit di Cempaka Mas ya kredit disitu buat sekolah, kan katanya ujian juga harus pakai laptop, makanya saya bela-belain sampai kredit laptop”* (Wawancara W, pedagang pecel lele).”

### **Kesehatan**

Jaminan kesehatan melalui BPJS merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakatnya, tidak terkecuali bagi para PKL di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. BPJS Kesehatan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun begitu, penggunaan BPJS Kesehatan bagi para PKL hanya diperuntukkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Penggunaan BPJS Kesehatan bagi para PKL hanya diperuntukkan terkait dengan penyakit-penyakit berat, sedangkan untuk penyakit-penyakit ringan para PKL cukup dengan pengobatan tradisional atau konsumsi obat warung, serta berobat ke klinik.

Jaminan kesehatan melalui BPJS telah menjadi upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakatnya, tidak terkecuali bagi para PKL di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. BPJS Kesehatan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun begitu, penggunaan BPJS Kesehatan bagi para PKL hanya

diperuntukkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh informan A berikut ini; *“kalau untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya kita ada BPJS dari pemerintah, tapi selama ini memang jarang kita pakai, karena memang untuk penyakit-penyakit berat BPJS itu, tapi kalau untuk sakit-sakit biasa ya kita cukup pergi ke klinik terdekat ajalah gitu, kalau untuk pemenuhan kesehatan sih gak ada masalah”* (Wawancara A, pedagang sate ayam dan kambing khas Madura).”

Penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 yang diberlakukan bagi masyarakat seperti; memakai masker, jaga jarak, pelarangan berkumpul di tempat umum telah menjadi peraturan bahkan kebiasaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Kepatuhan para PKL dalam menjalankan Prokes selama masa pandemi Covid-19 menjadi upaya menjaga dan memenuhi kebutuhan akan kesehatan keluarga. Selain pelaksanaan Prokes, pemerintah juga melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat. kondisi tersebut juga dilakukan pemerintah Kecamatan Palmerah dalam memberlakukan vaksin gratis bagi para PKL dalam menjaga kesehatan. Pemberian vaksin tersebut juga dilakukan diberbagai tempat, sehingga anak-anak para PKL juga mendapatkan layanan kesehatan melalui vaksin di sekolah-sekolah tempat anak-anak belajar.

Ketersediaan vaksin gratis dari pemerintah dalam membantu pemenuhan kesehatan para PKL telah membantu dalam pemenuhan kesehatan masyarakat, khususnya PKL selama masa pandemi Covid-19. Pemberian vaksin tersebut juga dilakukan diberbagai tempat, hingga anak-anak para PKL juga

mendapatkan layanan kesehatan melalui vaksin di sekolah-sekolah tempat anak-anak belajar. Kemudahan mendapatkan vaksin selama masa pandemi Covid-19 tersebut telah diungkapkan oleh informan A sebagai berikut; *“kalau dari pemerintah itu ya lagi-lagi melalui BPJS itu ya, kalau dari pemerintah itu paling seperti vaksin gitu, semuanya sih lancar, karena kan memang kalau buat anak itu dari sekolah juga disediakan, dan semua tersedia lah, tempat vaksin ada di banyak tempat sekarang udah mulai mudah gitu”* (Wawancara A, pedagang sate ayam dan kambing khas Madura).”

Pemenuhan kebutuhan kesehatan telah menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga, namun begitu bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah juga sangat diperlukan bagi para PKL dan masyarakat umum dalam membantu pemenuhan kebutuhan akan kesehatan.

Kemudahan mendapatkan layanan vaksin diberbagai tempat bagi masyarakat telah mendukung pemenuhan kebutuhan akan kesehatan para PKL selama masa pandemi Covid-19. Pemenuhan kebutuhan kesehatan menjadi perhatian penting bagi keberlangsungan perdagangan para PKL, oleh karena itu kebutuhan akan jaminan dan fasilitas kesehatan bagi para PKL menjadi perhatian utama. Pemenuhan kebutuhan akan kesehatan menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga, hal tersebut sangat dirasakan oleh informan W berikut ini; *“masa pandemi setelah kita putus dari BPJS ya masing-masing ya ke Puskesmas lah ya ke ini gitu, jadi masing-masing, kebetulan udah pada kerja ya jadi masing-masing masalah kesehatan keluarga ya ditanggung masing-masing”* (Wawancara W, pedagang pecel lele).”

*“kalau dari pemerintah kayaknya saya belum ini kayaknya, kartu semacam KIS segala macamnya kita juga gak punya BPJS Cuma yang dari kantor dulu. Ya kalau vaksin saya ikuti dua kali tinggal booster aja ini yang belum” (Wawancara W, pedagang pecel lele).”*

### **Rekreasional dan Waktu Luang**

Aspek rekreasional dari data temuan lapangan ini yaitu terkait dengan hiburan bagi para PKL selain kegiatan berdagang, dan penggunaan waktu luang setelah berdagang atau libur berdagang. Aspek rekreasional dan waktu luang menjadi bagian penting selama masa pandemi Covid-19, mengingat banyaknya tekanan dan masalah yang muncul, maka aspek rekreasional menjadi sarana penenang dalam kondisi yang tegang seperti di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Pembatasan sosial selama masa pandemi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah bagi masyarakat untuk tidak keluar rumah menjadikan para PKL kesulitan untuk mengakses hiburan di luar rumah. Oleh karena itu, bagi para PKL kebersamaan bersama keluarga di rumah telah menjadi hiburan tersendiri. Selain itu hiburan lainnya juga diperoleh melalui *Handphone* ataupun melalui acara hiburan yang ditampilkan stasiun Televisi, mengingat hiburan tersebut dapat di akses tanpa harus keluar rumah.

Aktivitas berdagang di luar rumah telah menguras banyak energi para PKL, kondisi tersebut menjadikan para PKL mengisi waktu luangnya dengan istirahat di rumah. Selain pembatasan yang diberlakukan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, lelah letihnya PKL dari kegiatan berdagang juga telah menjadikan rumah sebagai tempat

istirahat dan menghabiskan waktu luang bersama keluarga.

Rekreasional bagi banyak PKL dari data diperoleh dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Selain itu, adanya pembatasan keluar rumah, ataupun berkumpul di tempat umum selama masa pandemi Covid-19 turut memperketat akses rekreasional para PKL selama masa pandemi Covid-19. Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan W sebagai berikut; *“kalau untuk hiburan gak ada kayaknya, disini aja udah terhibur, kalau hiburan rekreasi selama pandemi ini enggak ya sama sekali di rumah saja lah” (Wawancara W, pedagang pecel lele).”*

### **Bantuan dan Jaminan Sosial**

Pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai bantuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat mencapai standar hidup yang lebih memuaskan. Salah satu bantuan dan juga jaminan sosial dari pemerintah bagi para PKL selama masa pandemi Covid-19 adalah untuk menjaga dan membantu keberlangsungan usaha serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bentuk bantuan dan juga jaminan sosial yang diberikan kepada para PKL yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga Sembilan bahan pokok (Sembako), serta bantuan bahan baku buat para pelaku usaha.

Bantuan dan juga jaminan sosial tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan H berikut ini; *“jaminan sosialnya sih kita kayak semacam bantuan gitu kayak BLT kayak gitu aja kayak sembako gitu, bahan baku buat usaha” (Wawancara H, Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Palmerah Sudin Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM).”*

Bantuan dana usaha selama masa pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan oleh para PKL dalam menjaga keberlangsungan perdagangan PKL. Dari data temuan lapangan, beberapa bantuan seperti yang diselenggarakan oleh BRI melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk bantuan usaha yang dirasakan manfaatnya oleh para PKL. Bantuan melalui KUR dapat memberikan gambaran bantuan dan jaminan sosial bagi para PKL yang dapat diakses selama masa pandemi Covid-19 dirasa telah membantu keberlangsungan perdagangan.

Bantuan dana usaha bagi para PKL melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga telah disebutkan oleh informan Z berikut ini; *“untuk saat ini sih ada, kita ikut BRI KUR yang kredit usaha rakyat itu kita ada tunjangan dari pemerintah” (Wawancara Z, pedagang fried chicken).*”

### **B. Kesejahteraan Ekonomi PKL di Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan data temuan lapangan, kesejahteraan ekonomi PKL selama masa pandemi Covid-19 dapat dilihat pada beberapa aspek seperti; Kondisi Usaha PKL, Produksi dan Penjualan, serta Tunjangan dan Pelatihan Usaha bagi para PKL selama menghadapi pandemi Covid-19. Kondisi PKL selama masa pandemi Covid-19 yang diketahui melalui beberapa aspek tersebut dapat menjadi gambaran kesejahteraan ekonomi para PKL di wilayah Kecamatan Palmerah.

#### **Kondisi Usaha PKL**

Pandemi Covid-19 yang terjadi tidak hanya memberikan dampak pada aspek kesehatan, namun juga

menghantam perekonomian masyarakat dan Negara. Sektor perdagangan, khususnya bagi para pelaku usaha informal yang mendapatkan pendapatan harian mengalami guncangan selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, pembatasan yang diberlakukan pemerintah turut menambah tantangan yang harus dihadapi oleh para PKL selama masa pandemi Covid-19. Kondisi tersebut sangat dirasakan oleh para PKL di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang berdampak pada penurunan bahkan keterpurukan usaha perdagangan para PKL. Dukungan pemerintah bagi keberlangsungan perdagangan para PKL menjadi bagian penting dalam memperkuat perdagangan PKL selama masa pandemi Covid-19.

Dukungan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan perdagangan PKL di Kecamatan Palmerah sangat dibutuhkan para PKL agar dapat melakukan perdagangan dan mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketetapan pemerintah yang mengatur tentang jam operasional para PKL, pembatasan waktu berdagang tersebut menjadi upaya pemerintah untuk meminimalisir sebaran Covid-19 serta pertemuan banyak orang. Namun begitu, ketetapan pemerintah tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi para PKL untuk menyesuaikan waktu berdagang sesuai dengan anjuran dan arahan dari pemerintah.

Kondisi usaha yang dihadapi para PKL selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan data temuan lapangan yaitu terkait dengan penurunan pendapatan, kondisi tersebut juga mempengaruhi produksi, penjualan, serta pemenuhan kebutuhan para PKL.

Penurunan pendapatan para PKL disebabkan oleh beberapa hal seperti; Daya beli masyarakat berkurang, orang lebih memilih menyimpan uangnya, dan adanya pembatasan-pembatasan dari pemerintah seperti; Dilarang berkumpul dan dilarang makan di tempat selama masa pandemi Covid-19.

Masalah perdagangan yang dihadapi oleh para PKL di Kecamatan Palmerah seperti yang dijelaskan informan A berikut ini; *“ya pendapatan otomatis menurun, ya karena memang daya beli masyarakat agak berkurang, yang pertama itu memang orang lebih memilih menyimpan uangnya untuk hal yang lainlah gitu, dan untuk yang kedua itu memang ada pembatasan-pembatasan yang orang itu gak boleh berkumpul gak boleh makan di tempat gitu, jadi udah gak bebas kayak dulu, ya itu memang otomatis lah gitu, jadi ya boleh kita akuin pendapatannya menurun lah gitu setengahnya lah gitu”* (Wawancara A, pedagang sate ayam dan kambing khas Madura).”

Lebih lanjut, penurunan pendapatan selama masa pandemi Covid-19 juga disebutkan oleh informan Z sebagai berikut; *“menurun sih, dari 100% mungkin ke 60% lah, ya itu entah dari omset entah dari apa.... ya sempet ada kepikiran mau banting setir juga karena omsetnya juga...., intinya kalo ketemu untuk makan aja udah Alhamdulillah, entah akhirnya gak habis ya bisa buat makan keluarga juga atau bagi bagi ke tetangga, ya intinya dari pandemi ini udah hampir 60% lah ada penurunan”* (Wawancara Z, pedagang fried chicken).”

Penurunan pendapatan menjadi masalah utama yang dirasakan oleh para PKL selama masa pandemi Covid-19, dan

tidak menutup kemungkinan terjadinya kebangkrutan, tutup usaha, atau gulung tikar bagi para PKL. Selain penurunan pendapatan, banyak dari barang dagangan para PKL tidak habis terjual, sehingga menjadikan PKL mengalami penurunan pendapatan dan kekurangan modal usaha. Secara umum, pendapatan para PKL hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan dan juga untuk menjaga keberlangsungan usaha.

### **Produksi dan Penjualan**

Kondisi penurunan pendapatan yang dialami oleh para PKL selama masa pandemi Covid-19 selaras dan juga diikuti dengan penurunan penjualan dan produksi usaha, sehingga produksi barang dagangan kecil dan penjualan serta pendapatan juga kecil. Penurunan produksi merupakan respon terhadap penurunan penjualan dan pendapatan para PKL. Sedangkan penurunan penjualan salah satu sebabnya adalah turunnya daya beli masyarakat, yang juga disebabkan oleh ketakutan masyarakat untuk keluar dari rumah selama masa pandemi Covid-19. Selain itu pembatasan dari pemerintah turut memperkuat orang untuk tidak berkumpul dan keluar rumah yang juga turut mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat dan turunnya penjualan barang dagangan para PKL.

Penurunan produksi barang dagangan para PKL tersebut seperti yang dijelaskan oleh informan A berikut ini; *“ya kalau produksi memang agak menurun ya kita selama pandemi, ya memang agak jauh lah bisa sampai setengahnya gitu kalau untuk produksi, karena kita menyesuaikan juga terkait dengan peraturan pemerintah yang begitu ketat mengatasi pandemi, jadi ya*

*memang gak kayak biasa-biasanya gitu kan, kalau dimasa sebelum pandemi itu kan kita biasanya bisa taruh lah kalau motong ayam itu bisa 20 kilo, nah kalau masa pandemi ini untuk produksi kita memang dikurangi separuhnya, karena memang daya belinya juga agak turun karena kan orang gak ada yang keluar gak ada yang berani keluar gitu, takutlah gitu” (Wawancara A, pedagang sate ayam dan kambing khas Madura).”*

Pandemi Covid-19 telah menuntut para PKL di Kecamatan Palmerah untuk berbenah dan mengambil sikap berdagang sesuai dengan kondisi yang dialami. Penurunan produksi, penjualan, dan pendapatan para PKL telah menjadikan para PKL melakukan perbaikan untuk dapat terus menjalankan perdagangannya selama masa pandemi Covid-19. Para PKL lebih berhati-hati serta menjaga produksi ataupun penjualannya. Selain perubahan kuantitas produksi, sistem penjualan para PKL juga sudah merambah dunia digital marketing untuk dapat bertahan dan atau mengembangkan perdagangannya selama masa pandemi Covid-19.

Penggunaan teknologi dalam perdagangan juga telah digeluti oleh para PKL di Kecamatan Palmerah selama masa pandemi Covid-19. Akan tetapi tidak semua PKL mampu mengikuti secara langsung perubahan perdagangan melalui digital, sedangkan untuk bertahan dan mengembangkan perdagangan selama masa pandemi Covid-19 salah satu solusinya adalah penggunaan teknologi. Masalah penggunaan teknologi dialami oleh para PKL yang sudah tua, atau kurang mengetahui penggunaan sarana teknologi dalam mengembangkan ataupun memasarkan barang dagangannya selama

masa pandemi Covid-19. Sehingga mereka membutuhkan waktu cukup lama untuk berbenah dan mengembangkan usaha perdagangan selama masa pandemi Covid-19.

### **Bantuan dan Pelatihan Usaha**

Bantuan atau pengembangan perdagangan merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan usaha, tidak terkecuali bantuan dan pengembangan usaha para PKL selama masa pandemi Covid-19. Berbagai bantuan bagi para PKL selama masa pandemi Covid-19 telah disediakan oleh berbagai pihak, baik itu dari pemerintah atau lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan para pelaku usaha lainnya. Berbagai bantuan tersebut dapat berupa bantuan langsung seperti uang dan bahan produksi, ataupun bantuan berupa pelatihan kerja atau pelatihan usaha.

Selanjutnya berbagai bantuan dari pemerintah sesuai dengan data temuan lapangan dapat diketahui melalui berbagai bentuk seperti; Bantuan Langsung Tunia (BLT), bantuan bahan baku untuk usaha, bantuan perizinan, bantuan permodalan merupakan bentuk usaha pemerintah dalam membantu dan mendukung keberlangsungan perdagangan para PKL selama masa pandemi Covid-19. Bantuan fasilitas tempat usaha dari pemerintah sebagai upaya mendukung pelaksanaan perdagangan sesuai dengan ketetapan pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Berbagai bantuan tersebut sudah seharusnya dapat membantu para PKL untuk dapat bertahan dan atau mengembangkan usahanya.

Bantuan pemerintah bagi PKL di Kecamatan Palmerah diantaranya seperti

yang telah diungkapkan oleh informan R berikut ini; *“membantu sih misalnya kayak adanya bantuan seperti BLT, terus bantuan bahan baku buat usahanya, yaitu peran pemerintah buat ngebantu selama masa pandemi, membantu perizinan, permodalan dan pelatihan untuk mempermudah usahanya lah”* (Wawancara R, Pendamping Kewirausahaan Kecamatan Palmerah).”

Berdasarkan data temuan lapangan, para PKL telah menunjukkan kemudahan mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya dengan jaminan surat usaha. Bantuan modal usaha yang diterima para PKL dirasa telah membantu keberlangsungan perdagangan selama masa pandemi Covid-19. Selain bantuan langsung atau bantuan modal selama masa pandemi Covid-19, para PKL di Kecamatan Palmerah juga mendapatkan penawaran bantuan dalam bentuk pelatihan kerja, pelatihan tersebut dapat menjadi usaha dalam mengembangkan usaha para PKL.

Bantuan fasilitas tempat usaha dari pemerintah seperti yang telah disebutkan informan H di atas sebagai upaya mendukung pelaksanaan perdagangan sesuai dengan ketetapan pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, bantuan modal usaha yang dirasakan PKL selama masa pandemi Covid-19 juga telah disebutkan informan W yaitu; *“dapet lah santunan pinjaman yang KUR itu dari bank DKI kebetulan dikasih 15 juta, jaminannya surat usaha aja itu, akhirnya saya memberanikan diri kebetulan nanya keluarga terus istri gimana nih ada pecel lele nih di SMA 78 ya dicoba aja lah”* (Wawancara W, pedagang pecel lele).”

Namun begitu, sesuai data temuan lapangan telah diketahui beberapa kesulitan yang dialami oleh para PKL untuk dapat mengikuti pelatihan kerja atau usaha yang dialami oleh para PKL saat melakukan pendaftaran, sehingga mereka tidak mengikuti berbagai pelatihan kerja atau usaha yang telah disediakan. Kegagalan dalam mengikuti pelatihan kerja atau usaha yang dialami oleh para PKL menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dalam menghadapi tantangan masa pandemi Covid-19. Kendala tersebut juga disebabkan minimnya informasi terkait dengan proses pelaksanaan pelatihan kerja atau usaha.

## Kesimpulan

### 1. Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan data temuan lapangan dan analisa yang telah dilakukan dapat diketahui kesejahteraan sosial PKL di masa pandemi Covid-19 melalui beberapa aspek, seperti; **Pertama**, perumahan atau tempat tinggal. Selama pandemi Covid-19, PKL telah mengurangi biaya pengeluaran untuk kebutuhan rumah, selain itu juga terdapat PKL yang harus kembali ke rumah orang tua karena tidak mampu menyewa tempat tinggal. Kondisi tersebut dilakukan oleh PKL sebagai upaya menjaga keberlangsungan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama. **Kedua**, pendidikan. Pemenuhan kebutuhan akan pendidikan di lingkungan keluarga PKL selama masa pandemi Covid-19 sangat terbantu dengan adanya pendidikan gratis dari pemerintah. Namun begitu, pandemi Covid-19 juga telah merubah sistem dan

bentuk pembelajaran menjadi *online* atau daring yang menuntut penggunaan teknologi sebagai media belajar mengajar seperti *handphone* atau *smartphone* dan laptop telah menjadi kebutuhan pendidikan. Munculnya kebutuhan tambahan dalam bidang pendidikan ini telah menuntut pengeluaran lebih para PKL dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan dalam keluarga.

Selanjutnya yang **Ketiga** yaitu aspek kesehatan. Jaminan kesehatan melalui BPJS dari pemerintah sangat dirasakan manfaatnya oleh para PKL, akan tetapi penggunaan BPJS kesehatan bagi para PKL hanya diperuntukkan pada penyakit-penyakit berat. Sedangkan untuk penyakit-penyakit ringan para PKL cukup dengan pengobatan tradisional atau konsumsi obat warung, serta berobat ke klinik. Selama masa pandemi Covid-19, para PKL senantiasa patuh pada Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan pemerintah dalam menjaga kebutuhan akan kesehatan keluarga. **Keempat**, Rekreasional dan waktu luang. Banyaknya tekanan dan masalah yang muncul selama pandemi Covid-19 telah menjadikan aspek rekreasional menjadi penenang dalam ketegangan. Rekreasional dan penggunaan waktu luang bagi para PKL selama masa pandemi Covid-19 adalah dengan berkumpul bersama keluarga, mengingat adanya pembatasan dari pemerintah serta banyaknya energi yang telah dikeluarkan dalam berdagang menjadikan rumah sebagai tempat istirahat dan menghabiskan waktu luang bersama keluarga. **Kelima**, bantuan dan jaminan sosial. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan dan jaminan sosial bagi para PKL untuk menjaga dan membantu

keberlangsungan usaha serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi Covid-19. Bentuk bantuan dan juga jaminan sosial yang diberikan kepada para PKL yaitu; Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga Sembilan bahan pokok (Sembako), bantuan bahan baku buat para pelaku usaha, serta bantuan untuk membuat surat perizinan untuk usaha.

### **Kesejahteraan Ekonomi**

Selain kesejahteraan sosial PKL di atas, pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada kesejahteraan ekonomi PKL yang menjadi pelaku usaha mikro. Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan ekonomi yang terpenting, mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar PKL secara adil dan merata pada bidang ekonomi. Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi yang mengarah pada upaya pengembangan ekonomi PKL yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi, pemberdayaan PKL. Indikator dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah adanya peningkatan pendapatan PKL yang juga merupakan tujuan dari adanya pengembangan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan ekonomi membutuhkan ketersediaan sumber-sumber seperti; uang atau barang, jasa pelayanan (*service*), serta berbagai kesempatan seperti pendidikan dan pelatihan kerja bagi para PKL selama masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data temuan lapangan dan analisa yang telah dilakukan, kesejahteraan ekonomi PKL selama masa pandemi Covid-19 mendapatkan goncangan dan keterpurukan usaha perdagangan.

Kesejahteraan ekonomi PKL dapat dilihat pada beberapa aspek berikut ini; **Pertama**, kondisi usaha PKL. Penurunan pendapatan merupakan kondisi usaha dan menjadi masalah utama yang dirasakan PKL selama masa pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan telah mempengaruhi produksi, penjualan, serta pemenuhan kebutuhan para PKL. Penurunan pendapatan para PKL disebabkan oleh beberapa hal berikut; berkurangnya daya beli masyarakat, orang-orang lebih memilih menyimpan uangnya, dan adanya pembatasan-pembatasan dari pemerintah seperti; dilarang berkumpul dan dilarang makan di tempat selama masa pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan juga dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan, tutup usaha, atau gulung tikar bagi para PKL selama pandemi Covid-19.

**Kedua**, produksi dan penjualan. Penurunan pendapatan PKL selama pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan produksi dan penjualan, sehingga kecilnya produksi barang dagangan PKL menjadikan penjualan dan pendapatan yang kecil. Pandemi Covid-19 telah menjadikan PKL lebih berhati-hati menjaga produksi, selain itu sistem penjualan PKL juga sudah merambah dunia digital marketing untuk dapat bertahan dan atau mengembangkan perdagangannya selama masa pandemi Covid-19. Penggunaan teknologi tersebut menjadi masalah tersendiri bagi para PKL yang sudah tua, atau kurang mengetahui penggunaan sarana teknologi dalam mengembangkan ataupun memasarkan barang dagangannya

**Ketiga**, bantuan dan pelatihan usaha. Berbagai bantuan bagi para PKL selama masa pandemi Covid-19 telah

disediakan oleh berbagai pihak, bantuan tersebut dapat berupa Bantuan Langsung Tunia (BLT), bantuan bahan baku untuk usaha, bantuan perizinan, bantuan permodalan, serta bantuan fasilitas tempat usaha merupakan bentuk usaha pemerintah dalam membantu dan mendukung keberlangsungan perdagangan para PKL selama masa pandemi Covid-19. Selanjutnya sesuai dengan data temuan lapangan dan analisa yang dilakukan, banyak dari para PKL di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai pelatihan kerja atau usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2018. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Edisi kedua, cet. Ke 3. Depok: Rajawali Pers.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi komunitas: pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS press
- Alston, M., & Bowles, . (2003). *Research for social workers: an introduction to methods*. 2nd ed. Australia: Allen & Unwin.
- Anshori, Endang Syaifuddin. 1983. *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Jakarta: Raja Grafindo
- Bryman, Alan. (2004). *Quantity and quality in social research*, New York: This edition published in the Taylor & Francis e-Library.

- Bugin, Burhan. 2013. *Analisis Data Dan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. cet ke 2
- Damsar. 2002. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Midgley, James. 1995. *Social development: the development perspective in social welfare*. California. Sage Publication.
- Mubyarto. 2000. *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Spicker, P. 1995. *Social policy: themes and approaches*. Hemel Hempstead: Prentice Hall.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarnonugroho, T. 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT. Hanindia.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwito, Warkum. 2010. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga terkait*. Cet. Keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, cet ke 5
- UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU. 2021. *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 pada Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia*, Jakarta.
- Yatim, Usman dan Hendargo Enny A. 1992. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT Bina Rena Parieara.
- Zastrow, Charles. 2010. *Social work and social welfare*. Canada: Brooks/Cole, Cengage Learning.

### Jurnal

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Barat. 2021. Kecamatan Palmerah dalam Angka 2021. ISBN: 978-623-94411-5-9. No. Publikasi: 31740.2107. Katalog BPS: 1102001.3174030.
- Fathoni, Ahmad. 2020. Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wuyung Surabaya. Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah. Volume 3 Nomor 1, ISSN 2477-0469. H. 30-69.
- Hanoatubun, Silpa. 2020. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Journal of Educations, Psychology and Counseling (EduPsyCouns), Volume 2, Nomor 1. ISSN Online 2716-4446.
- Modjo, Muhammad Ikhsan. 2020. Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. The Indonesian Journal of Development Planning, Volume IV No. 2. Juni 2020
- Pakpahan, Aknolt Kristian. 2020. Covid-19 dan Implikasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Fisip, Universitas Katolik Parahyangan.

- Diakses melalui <http://journal.unpar.ac.id/index.php/>
- Putriana. 2012. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kutubkhanah, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 15 No. 2. E-ISSN: 2407-1633. Diakses melalui: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/235/221>
- Purnama, Kadek Vrischika Sani. 2021. Perjalanan Covid-19 di Indonesia dan Kasus yang Muncul Dibaliknya dalam Perspektif Hukum dan HAM. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 3 Nomor 1 April 2021. P-ISSN: 2656-9639 E-ISSN: 2684-9046. Diakses melalui; <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/401/271>
- Saputra, Rholen Bayu. 2014. Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). Jom FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014
- Syauqi, Achmad. 2020. Jalan Panjang Covid-19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak pada Perekonomian). JKUBS Vol. 1 No. 1. ISSN 2745-4770 (Print), ISSN 2745-6315 (Online). Diakses melalui; <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>
- Susilo, Aditya. 2020, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini (Coronavirus Disease 2019: Review of Currents Literatures, Jurnal Penyakit Dalam IndoneSusisia, Volume 7 No. 1, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Tim YANMAS DPKM-UGM. Mei 2020. Dampak Awal Pandemi Covid terhadap UMKM. Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat (DPKM), UGM. Diakses melalui; <https://pengabdian.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/854/2020/05/Dampak-Awal-Pandemi-COVID-19-terhadap-UMKM.pdf>

### Website

- Abdullah, Nurudin. 2015. Tahukah Anda Nama Palmerah di Jakarta Barat?. Kabar24.bisnis.com, Januari 2015, editor; Fathul Maskur. Diakses melalui; <https://kabar24.bisnis.com/read/20150106/387/388422/tahukah-anda-nama-palmerah-di-jakarta-barat>.
- Alam, Sarah Oktaviani. 2021. Perjalanan Covid-19 Sejak Pasien Nol Muncul di China Hingga Kini Mendunia. Health.detik.com, 18 November 2021. Diakses melalui; <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5816333/perjalanan-covid-19-sejak-pasien-nol-muncul-di-china-hingga-kini-mendunia/2>.
- Alifa, Syadza. 2020. Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19. Diakses melalui; <https://puspensos.kemensos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-covid-19>
- Asiati, Devi. 14 Juni 2020. Strategi Bertahan Hidup Bagi Pelaku Usaha dan Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses melalui; <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/975-strategi-bertaha-hidup-bagi-pelaku-usaha-dan-pekerja-di-tengah-pandemi-covid-19>

- CNN Indonesia, 2021. "Jejak Pandemi Covid-19, dari Pasar hingga Mengepung Dunia". 04 agustus 2021. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia>.
- Folmer dan Maulana, Erikyanri. 2021. Petugas Hala PKL dan Parkir Liar di Stasiun Palmerah. Beritajakarta.id, Maret 2021. Diakses melalui: <https://www.beritajakarta.id/read/87809/petugas-halau-pkl-dan-parkir-liar-di-stasiun-palmerah#.YfCyc1iyTIU>
- Hanggoro, Hendaru Tri. 2015. Sejarah Pedagang Kaki Lima. Diakses melalui: <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/>
- Maharani, Tsarina. 2021. 3,83 Juta Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Tingginya Angka Kematian. Kompas.com, 15 Agustus 2021, Nursita Sari (Editor). Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/15/09211131/383-juta-kasus-covid-19-di-tanah-air-dan-tingginya-angka-kematian?page=all>
- Nabila, Ifa. 2020. "Jakarta PSBB, Pedagang Makanan Kaki Lima Menderita: Kalau Saya Stop Dagang, Ada Jaminan Dapat Uang?" Tribunnews.com, 14 September 2020. Diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/09/14/jakarta-psbb-pedagang-makanan-kaki-lima-menderita-kalau-saya-stop-dagang-ada-jaminan-dapat-uang?>
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Putra, Tri. Market, CNBC Indonesia, Juli 2020. Ekonomi RI Dihantui Resesi, Ini Saham yang Siap Serok. Diakses Melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200713142214-17-172249/ekonomi-ri-dihantui-resesi-ini-saham-yang-siap-serok>.
- Pratama, Sunbhio. 2021. "Jualan di Pinggir Jalan Raya, Disebut Pedagang Kaki Lima, Kok Bisa?". Kompas.tv, 24 November 2021. Diakses melalui: <https://www.kompas.tv/article/235306/jualan-di-pinggir-jalan-raya-disebut-pedagang-kaki-lima-kok-bisa>
- Siaran Pers Humas Kementerian Koperasi dan UKM. Juni (2020). Menkop UKM: "Masih Ada Peluang bagi UMKM di Tengah Covid-19. Diakses melalui: <http://www.depkop.go.id/read/menkop-ukm-masih-ada-peluang-bagi-umkm-di-tengah-covid-19>
- Shemi, Helmi. 2020. Kisah Pakde, Pedagang Pecel Ayam Palmerah Bertahan di Tengah Covid-19. idntimes.com, 18 April 2020. Diakses melalui: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/kisah-pakde-pedagang-pecel-ayam-palmerah-bertahan-di-tengah-covid>
- Siaran Pers Humas Kementerian Koperasi dan UKM. 2019. Menko dan UKM ingin Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas dengan Mekaar. 29 November 2019. Diakses melalui: <HTTP://WWW.DEPKOP.GO.ID/READ/MENKOP-DAN-UKM-INGIN-PELAKU-USAHA-MIKRO-NAIK-KELAS-DENGAN-MEKAAR>

Siaran Pers Humas Kementerian Koperasi dan UKM. Juni 2020 Menkop UKM Sebut UMKM yang Terkoneksi Digital Lebih Mampu Bertahan Hadapi Krisis. Diakses melalui

<http://www.depkop.go.id/read/menkop-ukm-sebut-umkm-yang-terkoneksi-digital-lebih-mampu-bertahan-hadapi-krisis>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

---

Yogi Sasongko, alumni S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [yogisasongko1996@gmail.com](mailto:yogisasongko1996@gmail.com)

Suhendra, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  
Email: [suhendra.fidkom@uinjkt.ac.id](mailto:suhendra.fidkom@uinjkt.ac.id)